

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan seluruhnya, dengan perbedaan tingkat dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada suatu negara yang terbebas dari masalah kemiskinan. Negara yang kaya dan maju di bidang keilmuan dan perindustrian juga mengalami masalah kemiskinan. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya. Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan semakin sulit pula cara untuk mengatasinya (Pirdaus, 2016)

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berupaya mengurangi angka kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk terbesar keempat dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 261 juta jiwa. Indonesia merupakan Negara besar dengan jumlah pulau yang banyak, ada sekitar 17.508 pulau dengan 6000 pulau yang dihuni oleh manusia. Ribuan pulau yang ada di Indonesia terbagi ke dalam 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda (BPS, 2010)

Tercatat persentase penduduk miskin di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, perkembangan penduduk miskin

perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren yang fluktuatif selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

**Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Daerah Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2007-2017.**



Sumber: BPS 2017 (data diolah)

Data di atas menunjukkan pada tahun 2007-maret 2013 persentasi penduduk miskin mengalami penurunan secara terus menerus dari 29.1 sampai 19.76 persen. Kemudian angka tersebut selalu mengalami perkembangan yang fluktuatif dari Maret 2013 - September 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Pada September 2013- September 2014 mengalami penurunan sebesar 0,87 persen, kemudian di periode Maret 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,39 persen. Dari Maret 2015 sampai September 2017 selalu mengalami penurunan dari 19,51 menjadi 17,38 persen.

Sementara data kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan secara konsisten. Meski penurunan tidak lebih dari 1% namun hal ini sangat positif jika angka kemiskinan selalu berkurang. Adapun persentase penduduk miskin di Jawa Timur dapat dilihat pada table 1.0 berikut:

**Tabel 1.0 Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Timur 2015-2019**

| <b>Tahun</b>      | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Persentase</b> | 12.34       | 12.05       | 11.77       | 10.98       | 10.37       |

Sumber: *bps.go.id*

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, bahwa dibentuknya Negara Indonesia dan dibentuknya pemerintah negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dalam pemahaman tersebut, fenomena kemiskinan adalah tanggungjawab dari Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, adapun kutipan pembukaan UUD 1945 tersebut sebagaimana kutipan di bawah ini:

*“.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”*

Fenomena kemiskinan sudah seperti rantai dan penyakit yang akut sehingga sukar untuk diputus dan diobati. Bahkan, upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan juga sudah didukung dan dikuatkan dengan berbagai aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta aturan lain yang mendukung pengentasan kemiskinan. Namun, dalam implementasinya perlu pengujian dan evaluasi yang holistik, karena realitanya fenomena kemiskinan masih banyak dijumpai disekitar kita.

Berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-undang pendukung telah banyak kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan agar keadilan di Indonesia tercapai secara merata dan masyarakat kurang mampu juga mendapat

kehidupan yang layak. Program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah antara lain adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) (*kebijakan dihapuskan*) serta program terakhir yang diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Simanjuntak, 2010).

Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2007 yaitu sejak pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari jerat kemiskinan (Astari, 2018).

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Tujuan akhir PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjangkau mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi pekerja anak, terutama untuk daerah yang terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kembali ke bangku sekolah. Komponen pendidikan dasar wajib 12 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH pendidikan yang berusia 7-18 tahun belum menyelesaikan program pendidikan

dasar 12 tahun harus mendaftarkan diri disekolah formal atau nonformal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta penerima PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu Program Nasional maupun lokal.

Setelah diuraikan secara singkat dasar dan tujuan digulirkannya PKH, program tersebut terlihat seakan-akan sangat ideal untuk dijadikan sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Seperti telah dipaparkan beberapa paket kebijakan yang dibuat dalam Undang-undang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PKH merupakan salah satu turunan dalam bentuk realisasi program paket kebijakan tersebut. Bertolak dari hal tersebut maka perlu dikaji dan diteliti ulang kebijakan tersebut agar terlihat dan terbukti bahwa kebijakan tersebut apakah efektif dalam mengatasi kemiskinan yang di klaim pemerintah sudah berhasil.

Klaim keberhasilan PKH, seperti dikutip Kompas.com (<http://regional.kompas.com/read/2015/12/26/19142891/Dipuji.Banl.Dunia.Kemensos.Naikkan.Jumlah.Penerima.PKH>. diakses pada 28 Desember 2019), bahwa PKH dianggap sukses menekan angka kemiskinan dan bahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan akan memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan. Kenaikan jumlah tersebut tidak lain karena didukung pujian dari Bank Dunia dan Kemensos berencana menaikkan penerima PKH dari 2,5 juta ditahun 2014 menuju 6 juta penerima di tahun 2016, artinya ada kenaikan 100 persen lebih dalam kurun waktu dua tahun dengan menghabiskan dana APBN 2016 sebesar Rp. 12 triliun dari Rp. 15,3 triliun total anggaran Kementerian Sosial (Kemensos RI).

Dari hasil penelusuran peneliti menemukan permasalahan implementasi PKH, ketika PKH diluncurkan pada tahun 2007, penerima manfaat program yang dipilih

merupakan rumah tangga sangat miskin, yaitu mereka yang berada dibawah 80 persen garis kemiskinan resmi saat itu. Hingga tahun 2012, program ini hanya menjangkau 1,5 juta, dibanding total 60 juta keluarga miskin di Indonesia dan sekitar 6,5 juta keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Hingga tahun 2019 penerima PKH mencapai 15 juta keluarga dari 25,4 juta penduduk miskin. Seharusnya PKH mampu menjangkau seluruh keluarga miskin. Saat ini PKH telah beroperasi diseluruh Provinsi di Indonesia. Perluasan cakupan wilayah merupakan tantangan PKH jika ingin memberikan dampak yang besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (Nazara & Rahayu, 2019).

Penilaian datang dari lembaga legislatif di Indonesia, seperti yang dikatakan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, menurutnya PKH belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan hanya menghabiskan anggaran Negara. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS pada September 2015), angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,3 persen dari total jumlah penduduk, (<http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>, diakses pada 29 Desember 2019). Lembaga legislatif lain yang juga mengungkapkan kritiknya adalah Irawan Pasaribu Ketua Komisi VII DPR, program PKH mengindikasikan dua hal. *Pertama*, bantuan PKH tidak berhasil menaikkan kualitas hidup masyarakat dan penerimanya. *Kedua*, tidak mencerminkan keadilan sosial, karena dari 26 juta jiwa penduduk miskin hanya 10 juta yang mendapatkan bantuan PKH. Sementara keluarga miskin yang lain belum tersentuh PKH dan belum ada indikator yang tepat dalam mengukur keberhasilan PKH. Kenaikan jumlah penerima PKH di rasa masih kurang efektif karena diduga masih banyak yang salah sasaran dalam menentukan keluarga miskin yang benar-benar berhak untuk menerima PKH (<http://nasional.kompas.com/read/2018/12/23/11340821/Habiskan.Dana.Besar.Progra>

*m.Penangulangan.Kemiskinan.Dinilai.Belum.Berhasi, diakses pada 29 Desember 2019).*

Di Jawa timur terdapat banyak kabupaten/kota yang menerima bantuan program keluarga harapan. Kabupaten/kota yang mendapat bantuan PKH adalah kabupaten yang dinyatakan rentan terhadap masalah kemiskinan dan berhak mendapat bantuan program keluarga harapan berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial (dinsos) terkait. Pada proses pelaksanaan PKH, Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi yang luar biasa pada tahun 2019 di tingkat nasional. Dari 11 kategori yang diserahkan 6 diantaranya diraih oleh Provinsi Jawa Timur. Salah satu kategori yang diraih adalah Provinsi yang telah berhasil mewujudkan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang artinya Jawa Timur telah berhasil mewujudkan tujuan utama dari PKH yaitu merubah perilaku KPM PKH menjadi produktif dan mandiri (Meilisa, 2019).

Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan menjadi tolok ukur keberhasilan PKH di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman berita regional kompas jatim, kelulusan PKM PKH dikarenakan mereka mengundurkan diri karena tidak mau atau hanya merasa malu rumahnya ditempeli stiker berlogo keluarga prasejahtera atau miskin.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian mengenai implementasi PKH di masyarakat. Tidak hanya itu, berangkat dari beberapa fenomena permasalahan dari realisasi PKH tersebut di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Membicarakan mengenai implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarso (2008: 146-147) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Leo Agustino (2014:138) kemudian menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2014)

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdampak Implementasi PKH adalah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan yang rata-rata penduduknya masih miskin. Ponorogo menjadi salah satu kabupaten terpilih untuk menerima bantuan PKH. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo telah dimulai sejak 2007 artinya sejak pertama program ini diluncurkan Ponorogo sudah terpilih menjadi Kabupaten sasaran PKH, hal tersebut didasarkan pada angka kemiskinan Ponorogo yang termasuk tinggi.

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo tiga diantaranya dinyatakan lolos dari masalah kemiskinan absolut sehingga tidak mendapat bantuan PKH, tiga kecamatan tersebut adalah, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Slahung, dan Kecamatan Babadan. Sementara kecamatan lain sebanyak 18 kecamatan yaitu Kecamatan Badegan, Sawoo, Bungkal, Balong, Pulung, Kauman, Sampung, Sukorejo, Siman, Jenangan, Mlarak, Jetis, Jambon, Sambit, Ngebel, Ngrayun, Pudak. Dan Sooko mendapat bantuan PKH karena terdapat banyak rumah tangga sangat miskin sehingga kesejahteraannya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Kecamatan Badegan merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 10 desa/kelurahan, yaitu: Desa Dayakan, Karang, Tanjungsrejo, Karangjoho, Tanjunggung, Bandaralim, Badegan, Kapuran, Watubonang, dan Biting. Kecamatan Badegan berada pada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Ponorogo pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin Kecamatan Badegan sebanyak 2.362 keluarga dari total keluarga 11.700 keluarga atau sekitar 20,19% dari jumlah rumah tangga di Kecamatan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.1 yaitu data jumlah rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin berikut:

**Table 1.1 Data Jumlah Rumah Tangga (RT), RT Sangat Miskin, dan RT Miskin Kecamatan Badegan 2017**

| <b>Desa</b>         | <b>Jumlah RT</b> | <b>Sangat Miskin</b> | <b>Miskin</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <b>Dayakan</b>      | 1682             | 362                  | 248           | 610          |
| <b>Karangan</b>     | 1908             | 195                  | 268           | 463          |
| <b>Tanjunggung</b>  | 855              | 58                   | 80            | 138          |
| <b>Karangjoho</b>   | 1145             | 37                   | 57            | 94           |
| <b>Tanjungsrejo</b> | 1175             | 115                  | 142           | 257          |
| <b>Bandaralim</b>   | 745              | 43                   | 42            | 85           |
| <b>Kapuran</b>      | 1035             | 60                   | 68            | 128          |
| <b>Badegan</b>      | 1215             | 52                   | 64            | 116          |
| <b>Watubonang</b>   | 1105             | 16                   | 27            | 43           |
| <b>Biting</b>       | 835              | 241                  | 187           | 428          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>11700</b>     | <b>1179</b>          | <b>1183</b>   | <b>2362</b>  |

Sumber: BPS, 2017 (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan jumlah rumah tangga miskin (RTM) setiap desa di Kecamatan Badegan. Desa Dayakan merupakan desa dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak yaitu 610 rumah tangga, sedangkan untuk data rumah tangga miskin

terendah adalah Desa Watubonang dengan jumlah 43 rumah tangga. Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Badegan, membuat kecamatan tersebut terpilih sebagai salah satu kecamatan penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Badegan diberikan sejak tahun 2007. Dalam upaya pengentasan kemiskinan PKH sudah terlaksana 12 tahun, namun dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Badegan dinilai kurang memuaskan. Kecamatan Badegan sendiri menjadi kecamatan yang masuk tiga besar dalam kategori jumlah penerima PKH bersama dengan Kecamatan Ngrayun dan Sawoo dengan jumlah penerima diatas 1500 keluarga (BPS, 2017).

Salah satu desa terdampak program keluarga harapan di kecamatan ialah Dayakan. Desa Dayakan merupakan desa yang jumlah penduduknya paling banyak menerima bantuan Program Keluarga Harapan berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Ponorogo Kecamatan Badegan dalam Agaka tahun 2017 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Badegan 2017**

| No.                 | Desa        | KPM PKH     | No. | Desa       | KPM PKH |
|---------------------|-------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1.                  | Dayakan     | 517         | 6.  | Bandaralim | 70      |
| 2.                  | Karangan    | 276         | 7.  | Kapuran    | 79      |
| 3.                  | Tanjunggung | 117         | 8.  | Badegan    | 60      |
| 4.                  | Karangjoho  | 98          | 9.  | Watubonang | 41      |
| 5.                  | Tanjungrejo | 57          | 10. | Biting     | 194     |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |             | <b>1509</b> |     |            |         |

Sumber: BPS, 2017

Dari tabel di atas menunjukkan Desa Dayakan merupakan desa yang mendapat bantuan PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak

di Kecamatan Badegan, sedangkan desa yang mendapat bantuan paling sedikit adalah Desa Watubonang.

Ketertarikan penulis menentukan wilayah penelitian dengan fokusnya di Desa Dayakan Kecamatan Badegan, karena Desa Dayakan merupakan salah satu desa tertinggal dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 610 keluarga. Permasalahan lain yang timbul ialah partisipasi pendidikan di Desa Dayakan masih tergolong rendah. Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa di Desa Dayakan Kecamatan Badegan Kab. Ponorogo masih banyak anak usia SMP justru tidak melanjutkan pendidikan karena terbentur masalah biaya.

Kepala desa setempat menyatakan bahwa sebagian besar anak desa hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar lalu memutuskan untuk bekerja menjadi kuli bangunan atau pembantu rumah tangga di luar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal demikian ternyata sudah menjadi hal yang biasa di Desa Dayakan. Meny soal bantuan PKH, kepala desa menambahkan bahwa bantuan PKH tidak cukup untuk memenuhi mahalnya biaya pendidikan di tingkat SMP sampai SMA.

Pernyataan tersebut juga didukung data dokumen RPJMDes 2018 Dayakan yang menyatakan lebih dari seribu penduduk desa tersebut buta huruf, adapun penduduk yang mencapai pendidikan SLTA tidak lebih dari 100 orang. Hal tersebut menunjukkan minimnya minat pendidikan di Desa Dayakan. Adapun data pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Data Pendidikan di Desa Dayakan**

| <b>No.</b>   | <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Jumlah (Jiwa)</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------|
| 1.           | Buta Huruf                | 1.631 Orang          |
| 2.           | Sekolah Dasar             | 1.323 Orang          |
| 3.           | SMP/SLTP                  | 303 Orang            |
| 4.           | SMA/SLTA                  | 97 Orang             |
| 5.           | PT                        | 5 Orang              |
| 6.           | Lain-lain                 | 547 Orang            |
| <b>Total</b> |                           | <b>3.906 Orang</b>   |

*Sumber Data : RPJMDes Desa Dayakan tahun 2018*

Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pokok permasalahan yang perlu dipecahkan. PKH sebagai program pemerintah yang berkonsentrasi memutus rantai kemiskinan dari pendidikan dan kesehatan perlu diteliti peranannya.

Partisipasi berobat ke Puskesmas di Desa Dayakan juga sangat minim, rata-rata kunjungan ke Puskesmas masyarakat hanya sekali dalam sebulan, itupun jika sudah penyakit terlanjur parah. Masyarakat lebih memilih berobat ke Dukun atau orang pintar (*suwuk*) dalam menyembuhkan penyakit keluarganya. Padahal tujuan utama PKH adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Seharusnya PKH mampu berperan besar dalam Bidang Kesehatan di Desa Dayakan mengingat penerima PKH di desa ini lebih besar dibanding desa yang lain di Kecamatan Badegan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Dayakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan diatas dan hasil peneliti terdahulu, maka Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah :

Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Dayakan ?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Dayakan.

### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian ilmu ekonomi terutama mengenai implementasi kebijakan ekonomi makro

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.